
Analisis Model Akuntansi Sektor Publik untuk Mencegah Kecurangan Penganggaran Keuangan

Divana Meliyana¹, Nuwun Priyono²

¹Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar
divanameli@gmail.com

²Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar
nuwunpriyono@untidar.ac.id

Abstract

This review plans to find and portray the qualities of fraud that happen in the public area in the advanced time and foster models of use of Public sector budgeting to forestall extortion that happens in the public area in the computerized age. The exploration did is a writing survey study obtained from articles as per the examination theme for additional investigation. The outcomes showed that the qualities of extortion in the public area that happened in the computerized period incorporate the utilization of misguided judgments in regards to the job of advanced innovation in the execution of public bookkeeping undertakings, the usage of computerized innovation to advance freedoms for fraud, taking advantage of issues in human blunder and absence of information in the utilization of innovation. computerized, utilizing advanced innovation items, to complete fraud. Utilization of public sector budgeting can forestall fraud in the public area in the advanced time whenever carried out by considering a few factors that impact extortion, like execution responsibility, and joined by the use of extortion counteraction techniques which incorporate specialized systems, two worldview approaches, and preventive procedures.

Keywords: Behavioral accounting, Fraud, Public sector accounting

Abstrak

Tinjauan ini dimaksudkan untuk menemukan dan menggambarkan kualitas fraud yang terjadi di ruang publik di masa depan dan mengembangkan model penggunaan Penganggaran Sektor Publik untuk mencegah pungli yang terjadi di area publik dalam waktu yang terkomputerisasi. Eksplorasi yang diarahkan adalah penelitian survei tulisan yang diperoleh dari artikel-artikel yang layak untuk dijadikan bahan pemeriksaan untuk penyelidikan lebih lanjut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ciri-ciri pemerasan di ruang publik yang terjadi di masa depan termasuk pemanfaatan kebingungan tentang tugas teknologi komputerisasi dalam pelaksanaan kewajiban pembukuan publik, penggunaan teknologi komputerisasi untuk meningkatkan kebebasan menyampaikan

pernyataan yang keliru, pemanfaatan isu-isu di ruang publik blunder manusia dan tidak adanya informasi dalam pemanfaatan teknologi terkomputerisasi, memanfaatkan item teknologi canggih, untuk menyelesaikan kesalahan fraud. Pemanfaatan pembukuan sektor publik dapat mencegah fraud di area publik di masa depan dengan asumsi itu dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang mempengaruhi pungli, seperti tanggung jawab eksekusi, dan pelaksanaan prosedur khusus, pendekatan dua pandangan, dan teknik pencegahan.

Kata kunci : Akuntansi Publik, Akuntansi Keperilakuan, Fraud

PENDAHULUAN

Teknologi terus berkreasi mempengaruhi siklus yang berbeda di kehidupan manusia. Efek ini berupa efek tertentu, yang mendukung peningkatan kecukupan dan efektivitas latihan manusia, atau bahkan efek pesimis, khususnya sebagai penyalahgunaan teknologi untuk penambahan individu dan membuat kemalangan untuk pertemuan yang berbeda. Berbagai sisi pengaruh teknologi ini mendorong perubahan cara pandang terhadap teknologi yang bergantung oleh pemikiran cerdas untuk menjamin bahwa kemajuan mekanis benar-benar menjadi alat yang memudahkan orang untuk menyelesaikan latihan mereka.

Efek normal dari kemajuan inovatif pada penganggaran sektor publik adalah eksekusi yang lebih mudah dan lebih cepat dari proses pembukuan yang berbeda, sama seperti data yang lebih tepat yang dibuat dari siklus ini. Bagaimanapun, ini harus dilakukan dengan asumsi pertemuan yang berhubungan dengan sistem pembukuan memiliki kemampuan untuk menggunakan item teknologi secara ideal dan dengan tujuan yang menggembirakan, khususnya untuk lebih mengembangkan administrasi kepada masyarakat umum. Kemampuan dan alasan positif untuk memanfaatkan teknologi dalam sistem pembukuan akan mendorong kecakapan dan kecukupan yang lebih tinggi. Kemudian, kemampuan dikombinasikan dengan tujuan yang merugikan, khususnya untuk memperoleh utilitas bagi diri sendiri, akan mendorong pemerasan.

Fraud adalah bahaya bisnis yang timbul pada tiap elemen bisnis, baik di badan negara ataupun organisasi eksklusif (Omar, M., Nawawi, A., & Salin, 2016). Organisasi yang besar atau kecil tidak bisa dipisahkan dari kasus terkait *fraud* di dalamnya, sehingga dapat dipastikan bahwa tidak ada organisasi yang kebal dari kelalaian yang disebut pemerasan/kecurangan. Sebagaimana ditunjukkan oleh konsep *fraud triangle*/segitiga kecurangan. Pemerasan bisa terjadi dikarenakan tiga faktor penting penyebabnya, yaitu ketegangan, peluang, dan pembenaran. Selain itu, ada juga teori *fraud* permata yang merupakan kemajuan dari segitiga pemerasan dengan satu variabel tambahan yang berkontribusi, yaitu kemampuan (Eyo Bassey, 2018). Selain itu, pemanfaatan teknologi terkomputerisasi yang masih belum merata karena informasi dan kapasitas kerja teknologi yang belum sepenuhnya dimiliki oleh semua elemen bisnis, mencakup masyarakat luas, memberikan peluang yang luar biasa untuk melakukan pungli.

Berdasarkan hasil tinjauan yang dipimpin oleh *ACFE-IC*, pencemaran nama baik adalah jenis pemerasan yang paling umum di Indonesia, diikuti oleh penyalahgunaan sumber daya, dan akhirnya adalah kesalahan penyajian laporan anggaran. Berdasarkan informasi, *ACFE-IC* juga mendeskripsikan perkiraan kerugian yang ditimbulkan akibat setiap jenis pemerasan. Sejalan dengan pengulangannya, penurunan nilai adalah jenis kesalahan penyajian yang paling merugikan, diikuti oleh penyalahgunaan sumber daya, dan terakhir laporan anggaran yang menipu. Meningkatnya jumlah pemalsuan, khususnya kasus-kasus pencemaran nama baik, sebagaimana informasi di atas tak pelak lagi diidentikkan dengan hadirnya teknologi-teknologi canggih yang memberikan kemampuan dan kebebasan yang lebih menonjol kepada para pelaku penyesatan. Namun, ini belum dipikirkan oleh analis sebelumnya. Sejujurnya, pemahaman tentang ciri-ciri *fraud* yang terjadi di ruang publik dalam waktu yang terkomputerisasi akan sangat berguna dalam merencanakan prosedur untuk membedakan tanda-tanda pungli serta teknik untuk mencegah *fraud* di kemudian hari, dan dapat bekerja dengan

eksekusi *Public Area Budgeting* untuk mencapai tujuan memberikan data moneter yang dapat diandalkan dan akurat.

Penganggaran sektor publik adalah instrumen pembukuan swasta yang diterapkan dalam tindakan asosiasi publik. Pembukuan area publik memiliki tingkat perusahaan dan kantor negara yang tinggi di bawahnya, seperti legislatif terdekat, perusahaan, kelompok ideologis, dan asosiasi non-manfaat lainnya (Halim, 2016). Akibatnya, latihan penganggaran area publik sama dengan praktik lain pada umumnya, hanya saja ada kendala bagi mitra yang merupakan pihak dari otoritas publik dan wilayah lokal yang lebih luas.

Melihat dari latar belakang tersebut, fenomena yang terjadi di Indonesia adalah salah satunya ditandai dengan meningkatnya jumlah fraud khususnya kasus korupsi di area publik, peningkatan kasus ini memiliki keterkaitan dengan adanya teknologi digital yang memberikan peluang bagi para pelaku fraud sehingga mereka lebih mudah untuk melakukan kecurangan. Untuk itu penelitian ini penting untuk dilakukan supaya mengetahui implementasi model penganggaran publik untuk meminimalisir fraud di area publik di masa depan yang didasarkan pada teori akuntansi keperilakuan. Perbedaan penelitian ini dengan yang ada sebelumnya karena penelitian ini lebih memfokuskan pada sektor penganggaran sektor publik. Kajian penelitian ini bergantung pada hipotesis pelaksanaan pembukuan untuk mengamati hubungan antara perilaku menyimpang berupa fraud atas penggunaan penganggaran sektor publik di area publik.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Dan Sumber Data

Penelitian ini berjenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut (Creswell, 2014). Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk melakukan eksplorasi atas topik yang diteliti hingga bisa diperoleh penjelasan rinci dan lengkap. Melalui pendekatan tersebut, peneliti berharap dapat memperoleh informasi

yang mampu digunakan untuk menggambarkan variabel, gejala, atau kondisi yang menjadi fokus penelitian.

2. Metode Pengumpulan Data

Data penelitian berupa data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan teori, data penelitian atau temuan pada penelitian sebelumnya dengan berbagai sumber yang berkaitan dengan topik penelitian yang akan dikaji.

Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan 3 tahapan analisis sebagai berikut (Bungin, 2017)

a. Reduksi data

Peneliti mengkaji data untuk mendapatkan data yang relevan dan mengecualikan data yang tidak sesuai dengan penelitian ini.

b. Penyajian Data

Setelah mengolah data yang diterima, data tersebut disajikan dalam bentuk deskripsi, diagram, hubungan antar kategori, flowchart, dll untuk memudahkan analisis dan interpretasi.

c. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan yang didapatkan dari analisis terhadap data untuk menjawab permasalahan penelitian. Analisis dilakukan secara induktif dengan mengkedepankan pemikiran dan pemahaman peneliti yang mengacu pada teori yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Zaman yang maju menghadirkan pandangan dunia lain dalam bidang pembukuan, bahwa perbaikan mekanis dengan setiap item mereka dipandang cocok untuk mencocokkan pekerjaan penting pembukuan dalam melakukan berbagai latihan pembukuan yang penting bagi organisasi. Pencatatan moneter untuk menyelidiki informasi moneter sampai batas tertentu telah dibagikan

dengan aplikasi dan pemrograman PC daripada bergantung pada ketepatan dan kelengkapan seorang pemegang buku karena alasan kecakapan dan kecukupan yang jauh tak tertandingi. Jika dilihat berdasarkan satu sisi saja, maka pada saat itu, ini adalah pengaruh positif dari teknologi untuk mempermudah usaha pemegang buku, sehingga pemegang buku dapat fokus menyelesaikan berbagai tugas yang tidak dapat digantikan oleh PC (Rini, 2019). Namun, menurut satu perspektif lagi, ini benar-benar menghadirkan kesulitan dan bahaya baru yang sangat lambat, lebih tepatnya kemungkinan salah tafsir dengan menggunakan teknologi canggih dan dengan memanfaatkan tujuan di balik persyaratan kecukupan dan efektivitas sebagai alasan untuk menutupi jejak pungli disampaikan dan mendorong kesimpulan tentang perlunya memanfaatkan teknologi terkomputerisasi. yang memungkinkan Fraud sulit untuk diidentifikasi dan berlangsung cukup lama.

Tantangan dan bahaya utama yang sangat esensial di alam ini hanyalah mentalitas orang-orang yang membayangkan bahwa mesin dan teknologi, untuk situasi ini teknologi data yang menjadikan domain terkomputerisasi, dapat mengisi orang, terutama panggilan pembukuan, dalam melakukan kapasitas pembukuan. (Cahyadi, 2019) Oleh karena itu, pandangan yang menggembirakan tentang eksistensi teknologi maju amat penting untuk konteks teknologi sebagai bahaya atau sebagai ujian yang dapat digunakan untuk perbaikan batas diri.

Isu yang muncul dari kebingungan atas tugas teknologi tingkat lanjut adalah kesempatan untuk memanfaatkannya untuk penambahan individu dengan menyedatkan perkumpulan yang tidak memiliki informasi yang cukup tentang pemanfaatan teknologi komputerisasi dalam mendukung sistem pembukuan. Hal ini sesuai dengan gagasan segitiga pemerasan dan permata Fraud dalam hal peluang dan kemampuan untuk melakukan pemerasan dengan memanfaatkan peningkatan teknologi terkomputerisasi dan informasi serta kapasitas yang miring untuk memanfaatkan teknologi ini di organisasi tertentu (Ruankaew, 2016)

Penggunaan teknologi canggih menawarkan kemampuan dan kecukupan yang jauh lebih tinggi, tetapi di sisi lain bergabung dengan pembentukan potensi

pemerasan karena semua data sumber daya ditentukan oleh proses input informasi. Kesalahan terkecil dalam input informasi, akan mempengaruhi semua data yang dibuat oleh aplikasi. Untuk situasi ini, kesalahan dapat disebabkan oleh kecerobohan, atau tidak adanya kemampuan untuk mengerjakan teknologi, atau karena pemerasan.

IC ACFE mengacu pada beberapa tipe Fraud yang implementasinya lebih mudah dengan penggunaan teknologi terkomputerisasi yang pertama adalah peretasan, khususnya dengan memasukkan informasi keuangan dan informasi penting lainnya oleh *programmer*, yang kemudian digunakan untuk peningkatan individu. Berikutnya adalah *malware*, yaitu dengan memanfaatkan infeksi untuk menerobos sistem pembukuan organisasi. Lantas, pada saat itu, perancangan sosial yang memanfaatkan teknologi terkomputerisasi untuk mengungkap data pribadi tentang dana organisasi. Ada juga penyalahgunaan keuntungan tambahan, yaitu penyalahgunaan akses yang diberikan ke data organisasi yang signifikan, dan gangguan aktual, yaitu mendapatkan informasi organisasi tanpa izin dan tanpa memiliki posisi untuk mendapatkannya.

Sehubungan dengan penggunaan pembukuan area publik untuk mencegah pemerasan, ini mengacu pada praktik tujuh komponennya yang melibatkan persiapan publik, perencanaan publik, pengakuan rencana keuangan publik, akuisisi tenaga kerja dan produk publik, pengumuman moneter publik, tinjauan area publik, dan tanggung jawab publik (Bastian, 2015). Implementasi tujuh komponen tersebut tidak terhindar dari bahaya pungli, sebagaimana dijelaskan (Free, 2015) terkait segitiga fraud/fraud triangle, bahwa pungli bisa timbul karena tiga variabel, diantaranya yaitu peluang, ketegangan, dan pertahanan. Dikombinasikan dengan keberadaan teknologi terkomputerisasi yang tampaknya memberikan kebebasan yang lebih penting dan menambahkan faktor pembatas seperti yang diungkapkan dalam hipotesis permata pemerasan (Ruankaew, 2016; Sujeewa et al., 2018). Batasan yang ditunjukkan untuk situasi ini adalah kepiawaian untuk melakukan pungli menggunakan berbagai item teknologi lanjutan.

Menurut klarifikasi dari ACFE IC, hadirnya teknologi komputerisasi dengan berbagai macam item dapat mendorong kemajuan teknik pengajuan pungli dalam tiga jenis Fraud (ACFE Indonesia, 2018). Selanjutnya, sesuai dengan asal mula perlunya pembinaan batas logika Pembukuan Wilayah untuk mengikuti perkembangan teknologi-teknologi yang lebih maju, maka penting pula untuk membentuk suatu model penyelenggaraan Pembukuan Wilayah Terbuka yang dapat dimanfaatkan untuk mencegah pungli di waktu komputerisasi.

ACFE IC mengusulkan teknik fundamental untuk menaklukan peristiwa pungli yang dapat di aplikasikan oleh area publik khusus dan area bisnis lainnya. Prosedur tersebut berpusat pada upaya untuk mencegah kemalangan informasi (ACFE Indonesia Part, 2018). Jenis metodologi yang dapat dijalankan adalah dengan memanfaatkan administrasi pejabat perlindungan yang mendapat teknologi dan hukum, memiliki program kerja, dapat menentukan strategi keamanan informasi, serta teknologi dan instrumen yang diharapkan dapat melindungi informasi organisasi, memahami pentingnya klasifikasi informasi klien dan informasi teman, mengawasi ketersediaan informasi dengan web untuk menjamin kemudahan web of things (IoT) dan mencegah peristiwa penghapusan informasi organisasi dari pertemuan luar, memutuskan tingkat kerahasiaan informasi organisasi dan tingkat ahli untuk akses informasi, menetapkan rencana perincian dan fokus pada kepraktisan pengungkapan, dan pengamatan lengkap dan pengendalian informasi secara konsisten berkelanjutan. Sebagaimana dijelaskan dalam hipotesis Conduct Bookkeeping, bahwa perilaku manusia memiliki hubungan yang nyaman dengan kerangka pembukuan, dimana perubahan yang terjadi di suatu arah akan menjadi faktor pemicu terjadinya perubahan di arah yang berlawanan (Supriyono, 2018). Oleh karena itu, jika organisasi dapat membuat musuh budaya Fraud memiliki pilihan untuk mengubah kepribadian setiap individu dari organisasi, maka, pada saat itu, penyesuaian yang berlarut-larut ini akan menjadi penghalang untuk pemerasan. Ini diselesaikan dengan menyampaikan nilai keaslian dan mengklarifikasi konsekuensi buruk dari salah tafsir pada semua aspek organisasi.

Klarifikasi ini disampaikan kepada pihak dengan situasi paling penting dalam organisasi kepada staf pada tingkat paling rendah oleh pemegang buku atau oleh petugas perlindungan yang secara eksplisit merinci masalah pemerasan dalam organisasi (McMahon, R., Pence, D., Bressler, L., & Bressler, 2016). Peristiwa Fraud di era komputerisasi semakin sulit diidentifikasi karena instrumen baru yang dapat digunakan untuk melakukan kegiatan tersebut. Ketika akibat merugikan seperti kemalangan untuk skala yang sangat besar telah dirasakan, baik sebagai kemalangan moneter maupun kemalangan dalam berbagai sudut pandang, maka, pada saat itu, organisasi hanya melihat ke dalam pemerasan. Oleh karena itu, upaya pencegahan pungli secara konsisten menitikberatkan pada strategi pengenalan yang bersifat preventif.

Di samping peningkatan teknologi terkomputerisasi, teknik pengenalan pungli tetap harus terus diselidiki di agar dapat diterapkan secara memadai dan dapat mengidentifikasi tanda-tanda kekeliruan dengan memanfaatkan teknologi tingkat lanjut. Menurut (Donning, H., Eriksson, M., Martikainen, M., & Lehner, 2019), pengembangan kerangka kerja penemuan kesalahan adalah sesuatu yang mudah dilakukan karena mencakup teknologi baru dan membutuhkan bantuan keuangan dari organisasi yang secara eksplisit membagikannya kepada perang pemerasan. Namun, pelaksanaan kerangka akan benar-benar ingin membantu organisasi dalam mengamati, menyelidiki, mempertimbangkan, dan mengajukan berbagai upaya brilian untuk mengidentifikasi dan memerangi pemerasan. Kerangka pengenalan pemerasan yang melakukan latihan mereka menggunakan tiga strategi dasar, khususnya perhitungan AI, penggalian informasi, dan meta-learning dapat memiliki wawasan yang terus berkembang seiring siklus yang dilaluinya. Kerangka kerja ini dapat menyimpan data tentang teknik dan kualitas pernyataan palsu yang diketahui, memeriksanya untuk membuat indikator pemerasan, dan menggunakannya untuk mengidentifikasi pola pemerasan.

KESIMPULAN

Berlandaskan analisis yang telah dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa :

1. Ciri utama fraud di area publik yang terjadi dalam era digital termasuk dalam kurang optimalnya pemanfaatan teknologi tingkat lanjut dalam pelaksanaan kewajiban pembukuan publik, penggunaan teknologi tingkat lanjut untuk mengefisienkan kebebasan menyampaikan pernyataan yang salah.
2. Untuk meminimalisir adanya human error atau kesalahan manusia dan tidak adanya informasi dalam pemanfaatan teknologi tingkat lanjut, dapat dilakukan dengan memanfaatkan item teknologi tingkat lanjut, seperti mata uang digital, untuk melengkapi pernyataan yang salah.
3. Pemanfaatan Penganggaran Sektor Publik dapat mencegah fraud area publik di masa depan dengan asumsi diselesaikan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pungli, seperti tanggung jawab eksekusi, dan dibarengi dengan penerapan teknik pencegahan pungli yang menggabungkan sistem khusus, dua- pendekatan pandangan dunia, dan prosedur pencegahan. Kemudian, Metodologi khusus termasuk upaya pencegahan pemerasan menggunakan administrasi resmi keamanan, akses IoT, mengawasi akses informasi, membangun perincian yang nyaman, dan mengendalikan informasi secara terus menerus.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini memiliki beberapa kelemahan atau kekurangan. Kelemahan yang ada adalah sebagai berikut :

1. Data yang digunakan dalam penelitian ini hanya berasal dari dokumen-dokumen internet sehingga kurang kuat untuk mendukung teori dalam penelitian ini.
2. Variabel yang digunakan terbatas sehingga penyampaian penjelasan belum tersampaikan secara luas untuk menggambarkan kondisi yang sebenarnya.
3. Penelitian terkait pencegahan kecurangan di sektor penganggaran keuangan dilakukan secara umum yaitu di Indonesia.

Berdasarkan kelemahan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut :

1. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan data primer dengan melakukan wawancara kepada pihak terkait untuk mendapatkan informasi secara lebih mendalam dan valid.
2. Menambahkan variabel lain yang sejalan dengan topik penelitian.
3. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian secara lebih spesifik. Misalnya dengan melihat fenomena terkait kasus fraud yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggal peneliti.

DAFTAR RUJUKAN

- Abri, A. F., Arumugam, D., & Balasingam, S. 2019. Impact of the Corporate Governance on the Financial Statement Fraud: A Study Focused on Companies in Tanzania. *International Journal of Recent Technology and Engineering*, 8(58), 336–341.
- Akay, E. M., Poputra, A. T., & Kalalo, M. Y. B. 2016. Analisis Aspek Keperilakuan Terhadap Penerapan Sistem Akuntansi Persediaan Pada PT. Surya Wenang Indah Manado. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(1), 688–697.
- Aksa, A. F. 2018. Pencegahan dan Deteksi Kasus Korupsi pada Sektor Publik dengan Fraud Triangle. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi (JEBA)*, 20(4), 1–17.
- Antarwiyati, P., & Purnomo, R. E. 2017. Motivasi melakukan fraud dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 12(2), 157–166.
- Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) Indonesia Chapter. 2017. *Survai Fraud Indonesia 2016*. In Auditor Essentials. Jakarta.
- Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) Indonesia Chapter. 2018, August). *Sewindu ACFE Indonesia*.
- Bastian, I. (2015). *Lingkup Akuntansi Sektor Publik*. 1–52.
- Bungin, B. (2017). *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (2017th ed.). PT Fajar Interpretama Mandiri.
- Cahyadi, I. F. (2019). *Peranan Sistem Informasi Akuntansi dan Tantangan Profesi Akuntan di Era Revolusi Industri 4.0 (Sebuah Studi Fenomenologi)*. 2, 69–82.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Quantitative And Qualitative Approach*

(2014th ed.). Sage Publishing.

- Donning, H., Eriksson, M., Martikainen, M., & Lehner, O. M. (2019). Prevention and Detection for Risk and Fraud in the Digital Age – the Current Situation. *ACRN Oxford Journal of Finance and Risk Perspectives*, 8, 86–97.
- Eyo Bassey, B. (2018). Effect of forensic accounting on the management of fraud in microfinance institutions in cross river state. *IOSR Journal of Economics and Finance*, 9(4), 79–89.
- Free, C. (2015). Looking Through the Fraud Triangle: A Review and Call for New Directions. *SSRN Electronic Journal*.
- Halim, A. (2016). *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Salemba Empat.
- McMahon, R., Pence, D., Bressler, L., & Bressler, M. S. (2016). New Tactics In Fighting Financial Crimes: Moving Beyond The Fraud Triangle. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 19(1), 16–25.
- Omar, M., Nawawi, A., & Salin, P. (2016). The Causes, Impact And Prevention Of Employee Fraud - A Case Study Of An Automotive Company. *Journal of Financial Crime*, 23(4), 1012–1027.
- Rini, Y. T. (2019). Mengurai Peta Jalan Akuntansi Era Industri 4.0. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi*, 7(1), 58– 68.
- Ruankaew, T. (2016). Beyond the Fraud Diamond. *International Journal of Business Management & Economic Research*, 7(1), 474–476.
- Supriyono, R. . (2018). *Akuntansi Keperilakuan* (2018th ed.). Gajah Mada University Press.
- KRISTIYANI, D., & HAMIDAH, H. (2020). Model Penerapan Akuntansi Sektor Publik Untuk Mencegah Fraud Pada Sektor Publik Di Era Digital. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 22(2), 289-304.
- Wahyuni, W., & Budiwitjaksono, G. S. 2017. Fraud Triangle Sebagai Pendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi*, 21(1), 47.
- Zanaria, Y. 2017. Pengaruh Aplikasi Teknologi, accounting reporting Terhadap Pencegahan Fraud dan serta implikasinya terhadap reaksi investor. *Jurnal Akuisisi*, 13(1), 91–100.